

POLITICAL WILL PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Yasmin Albaar¹ Astika Ummy Athahirah²

NPP. 32.1032

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

¹Email: 32.1032@praja.ipdn.ac.id ²Email: astika@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Astika Ummy Athahirah, S.STP., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): Food security is a problem faced by all countries in the world, including Indonesia. Indonesia's Food Security Index is still below the world average. Besides that, the National Food Security Index of North Maluku Province is low, which is ranked 3rd lowest, but one of the cities in North Maluku Province, Ternate City, has a high Food Security Index, which means that food security in Ternate City is good. **Purpose:** This research aims to get an idea about the political will, supporting and inhibiting factors, and local government efforts in realizing food security in Ternate City, North Maluku Province. **Method:** This research uses a post-positivism paradigm approach called Quasi-Qualitative Design (QQD) or semi-qualitative. The data in this research were collected using triangulation techniques, namely a combination of observation, interviews and documentation. The data collected were then analyzed using the NVivo 12 application. **Result:** The results of this research indicate that the political will of the Ternate City local government in realizing food security is good. This is one of the reasons why Ternate City is the most food secure area in North Maluku Province. In realizing food security in Ternate City, there are supporting factors in the form of sufficient budget, quality human resources and communication and synergy with various parties. Meanwhile, inhibiting factors are the lack of budget and quality human resources and also bad weather conditions. However, the Ternate City local government has made efforts to overcome the existing inhibiting factors. The efforts are to maximize the use of the budget effectively and efficiently and to develop the quality of human resources. **Conclusion:** the political will of the Ternate City local government in realizing food security is good. There are supporting and inhibiting factors in realizing food security in Ternate City, but Ternate City local government has made efforts to overcome the existing inhibiting factors. Therefore, it is better if Ternate City can be used as an example for other local government

Keywords: Political Will, Food Security, Local Government

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Sedangkan, Indeks Ketahanan Pangan Nasional Provinsi Maluku

Utara termasuk rendah yaitu berada pada peringkat 3 terbawah, namun salah satu Kota di Provinsi Maluku Utara yaitu Kota Ternate memiliki Indeks ketahanan Pangan yang tinggi yang berarti ketahanan pangan di Kota Ternate sudah baik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai *political will*, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme yang dinamakan dengan *Quasi-Qualitative Desain* (QQD) atau semi kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh menggunakan teknik triangulasi, yaitu gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan aplikasi NVivo 12. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *political will* pemerintah daerah Kota Ternate dalam mewujudkan ketahanan pangan sudah baik. Hal ini menjadi salah satu alasan Kota Ternate menjadi daerah paling tahan pangan di Provinsi Maluku Utara. Dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate, terdapat faktor pendukung berupa anggaran yang cukup, SDM yang berkualitas serta komunikasi dan sinergitas dengan berbagai pihak. Sedangkan, faktor penghambat berupa kurangnya anggaran dan SDM yang berkualitas serta kondisi cuaca yang buruk. Namun, pemerintah daerah Kota Ternate telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang ada. Upaya yang dimaksud adalah memaksimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien serta mengembangkan kualitas SDM. **Kesimpulan:** *Political will* pemerintah daerah Kota Ternate dalam mewujudkan ketahanan pangan sudah baik. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate, namun pemerintah daerah Kota Ternate telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang ada. Oleh karena itu, sebaiknya Kota Ternate dapat dijadikan percontohan bagi daerah lainnya.

Kata kunci: *Political Will*, Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan pangan dunia terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Semakin padatnya penduduk bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menimbulkan permasalahan ketahanan pangan nasional. Namun, pertumbuhan penduduk ini dapat menimbulkan permasalahan lain, yaitu permasalahan kurangnya lahan pertanian karena lahan yang semula berfungsi sebagai lahan pertanian harus beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan industri untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Berbagai permasalahan inilah yang menjadi ancaman dan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan. KTT Ekonomi Dunia 1974 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai ketersediaan pasokan pangan dunia yang cukup berupa bahan pangan pokok untuk mempertahankan perluasan konsumsi pangan yang stabil dan untuk mengimbangi fluktuasi produksi dan harga (Nor & Yusof, 2025). Selanjutnya definisi ini didukung oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO), ketahanan pangan mengacu pada situasi di mana masyarakat mampu memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan sesuai dengan kebudayaan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan mental tubuh (Muhyie et al., 2025).

Menurut *Global Report on Food Crises* (GRFC) yang terbaru, hampir 282 juta orang di 59 negara dan wilayah mengalami kelaparan akut tingkat tinggi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan di seluruh dunia sebanyak 24 juta dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan laporan krisis pangan serta kemerosotan tajam dalam ketahanan pangan. Krisis pangan ini tentunya dapat mengganggu stabilitas politik dunia (FAO, 2024).

Sebagai upaya pencegahan krisis pangan, dilakukan suatu pengukuran indeks ketahanan pangan yang di sebut *Global Food Security Index* (GFSI). *Global Food Security Index* atau Indeks Keamanan Pangan Dunia adalah penilaian tahunan yang mengukur ketahanan pangan sesuai dengan dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi dan stabilitas pangan.

Menurut *Global Food Security Index* pada tahun 2022, ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi ke-63 dari 113 negara di dunia dengan nilai 60,2. Nilai ini masih berada di bawah rata-rata dunia, yaitu 62,2. Sehingga sampai saat ini, peningkatan ketahanan pangan masih menjadi salah satu urgensi dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama perlu adanya peningkatan ketahanan pangan di Indonesia, yaitu (1) menjamin akses perolehan pangan yang berkecukupan dan bergizi bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia, (2) pola konsumsi yang cukup dan bergizi adalah fondasi bagi terbentuknya manusia-manusia Indonesia yang berkualitas, (3) ketahanan pangan adalah faktor utama pendorong ketahanan ekonomi, bahkan pendorong ketahanan nasional serta stabilitas politik suatu negara berdaulat (Sutrisno et al., 2022).

Mewujudkan ketahanan pangan merupakan wujud pelaksanaan fungsi pemerintahan. Rasyid mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), pengaturan (*regulatory*) dan pembangunan (*development*) (Labolo, 2011). Dalam hal ini, pemerintahan adalah serangkaian kegiatan dari kelompok-kelompok yang terpilih melalui mediasi kepentingan rakyat, yaitu pemerintah yang selanjutnya membuat, melaksanakan hingga mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini yang harapnya mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan di suatu negara (Thahir, 2019).

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan di setiap daerah di Indonesia maka dilakukan suatu penilaian ketahanan pangan. Pengukurannya disebut dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Penyusunan IKP disesuaikan dengan metode pengukuran *Global Food Security Index* (GFSI), tetapi tetap disesuaikan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan 2023, Provinsi Maluku Utara dengan nilai IKP 62,34 menempati posisi 3 terbawah atau berada pada peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Namun, IKP Kota Ternate tahun 2023 berada pada peringkat pertama di Provinsi Maluku Utara dengan nilai 89,51. Nilai ini sangat baik jika dibandingkan dengan IKP pada kabupaten/kota yang lain di Provinsi Maluku Utara. Faktanya Kota Ternate berada pada peringkat ke-18 dari 98 kota di Indonesia dan Kota Ternate menjadi daerah yang paling tahan pangan se-Indonesia Bagian Timur (NTT, Papua dan Maluku). Hal ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya *political will* (kemauan politik) dari pemerintah daerah Kota Ternate dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate. Secara sederhana dikemukakan oleh Malena (2009), *political will* adalah suatu niat yang dapat dipercaya (kredibel) yang ditunjukkan oleh para aktor politik (Thuynsma, 2025).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peneliti berfokus pada permasalahan ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu isu strategis dunia, termasuk Indonesia. Dimana *Global Food Security Index* Indonesia pada tahun 2022 masih berada di bawah rata-rata dunia. Untuk itu, perlu adanya peningkatan indeks ini. Peningkatan ini dimulai dari lingkup kecil ke lingkup yang lebih besar, dimulai dari peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, kemudian peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, sehingga dapat mendorong peningkatan *Global Food Security Index* Negara Indonesia.

Menurut data Indeks Ketahanan Pangan tahun 2023, Provinsi Maluku Utara berada peringkat 3 terbawah yaitu peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Namun, salah satu kota di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kota Ternate memiliki Indeks Ketahanan Pangan di angka 89,51, angka ini menunjukkan keberhasilan Kota Ternate sebagai daerah yang paling tahan pangan di Provinsi Maluku Utara bahkan di Indonesia Bagian Timur. Keberhasilan ini perlu diteliti lebih lanjut, sehingga Kota Ternate dapat dijadikan percontohan bagi kabupaten/kota lainnya khususnya di Provinsi Maluku Utara. Pada penelitian ini, peneliti akan secara spesifik berfokus pada *political will* pemerintah daerah, faktor

pendukung dan penghambat, serta upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate sebagai daerah paling tahan pangan di Provinsi Maluku Utara.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, kajian yang secara spesifik membahas mengenai *political will* pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan masih sangat jarang dibahas pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi beberapa penelitian terdahulu ini masih bisa dijadikan acuan terkait mewujudkan ketahanan pangan di suatu daerah. Penelitian pertama berjudul Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan) oleh Virginia V. Rumawas, Herman Nayoan, dan Neni Kumayas (2021), menemukan bahwa peran pemerintah kabupaten minahasa selatan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun, masih perlu ada perbaikan pada sistem pengawasannya, seperti rutin melaksanakan evaluasi dan inspeksi dadakan sehingga dapat diketahui permasalahan di lapangan secara riil (Rumawas et al., 2021). Penelitian kedua berjudul Implementasi Strategi Dinas Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru oleh Nukita Duana Nijou Siahaan dan Abdul Sadad (2022), ditemukan bahwa strategi yang dilakukan belum maksimal jalannya. Belum maksimalnya penerapan strategi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan, kurangnya pelaksanaan evaluasi dan kurangnya partisipasi masyarakat (Siahaan & Sadad, 2022). Penelitian ketiga berjudul Strategi dan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang oleh Dinda Yusti Suhaedah, Udin Syamsudin dan Thita Moralitha Mazya (2023), menemukan bahwa pelaksanaan strategi dan kebijakan ketahanan pangan di kabupaten tangerang sudah baik. Namun, masih banyak daerah dengan status rentan pangan di kabupaten tangerang. Faktor pendukung dan penghambat juga perlu diperhatikan (Suhaedah et al., 2023). Penelitian keempat berjudul Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Menjaga Ketersediaan Kebutuhan Pangan di Kota Batam oleh Donita Ega Stefani Sirait (2023), dengan temuan bahwa peran dinas ketahanan pangan dan pertanian kota batam sebagai innovator, stabilisator dan modernisator masih lemah dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Batam (Sirait, 2023). Penelitian terakhir berjudul Collaborative Governance Pemerintah Daerah Dan Satkowil Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Mimika oleh Dewa Gede Mahendra, Lukman Munawar Fauzi dan Dahly Sukmapriyandhika (2024), menemukan bahwa meningkatkan ketersediaan aksesibilitas pangan sudah menunjukkan collaborative governance yang efektif antara pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan Satkowil. Meskipun realisasi ketahanan pangan di mimika belum sepenuhnya, namun sudah terdapat kemajuan dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena masih kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten mimika (Mahendra et al., 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan hasil penjabaran dari 5 (lima) penelitian terdahulu maka disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yang menjadi kebaruan dari penelitian yang dilakukan terdapat pada lokasi penelitian dan fokus penelitian karena belum ada penelitian yang secara spesifik membahas terkait *political will* pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Ternate. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada pendekatan penelitian dan teknik analisis data yang digunakan dimana penelitian ini, menggunakan pendekatan

Quasi-Qualitative Design (QQD) dan *Data Analysis Procedure by Application* (DAPA), yaitu menggunakan aplikasi NVivo 12.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait *political will* pemerintah daerah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme yang dinamakan dengan *Quasi-Qualitative Desain* (QQD) atau kualitatif semu. Disebut kualitatif semu karena memiliki konsep yang serupa dengan desain deskriptif kuantitatif yang berarti belum sepenuhnya kualitatif karena masih dipengaruhi oleh kebiasaan kuantitatif yang terlihat dari penempatan teori dalam data yang diperoleh (Purnamawati, 2020). Tahapan QQD yaitu (1) *searching the problem*, (2) *literature review*, (3) *founding gap*, (4) *constructing hypothesis*, (5) *planning data sources*, (6) *constructing data collections method*, (7) *using a theoretical framework*, (8) *data collections*, (9) *keep a diary, transcript, coding, themes, categorization and memos*, (10) *trying to find new sources of information*, (11) *triangulation*, (12) *constructing theory*, (13) *confirmation theory*, dan (14) *constructing new theory* (Bungin, 2020). Namun, pada penelitian ini, peneliti hanya melaksanakan tahapan (1) sampai dengan (11), karena penelitian ini tidak bertujuan untuk melahirkan teori baru melainkan untuk melahirkan suatu unsur kebaruan dengan penggunaan teori yang telah ada.

Data diklasifikasi menurut sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder (Simangunsong, 2016), sehingga peneliti mengumpulkan data dengan teknik triangulasi, yaitu melalui proses wawancara dan observasi untuk memperoleh data primer dan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Proses wawancara dilakukan kepada 11 orang informan yang terdiri atas Perencana, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan, Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian Kota Ternate yang masing-masing berjumlah 1 orang (sehingga total 6 orang informan), serta masyarakat petani sebanyak 5 orang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan aplikasi NVivo 12. Adapun data dianalisis dengan teori *political will* menurut Brinkerhoff (2010), *political will* yang terdiri dari inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penegakkan hukum, kontinuitas usaha, serta adaptasi dan belajar (D. Brinkerhoff, 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas terkait *political will* pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate, faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate, serta upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate.

3.1. *Political Will* Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Ternate

Berikut ini merupakan pembahasan terkait *political will* pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan teori *political will* menurut Brinkerhoff (2010) yang terdiri dari inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penegakkan hukum, kontinuitas usaha, serta

Gambar 5. *Word Cloud* Penegakkan Hukum



Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi NVivo 12, 2025

Dilihat pada **Gambar 5** diatas menunjukkan kata yang paling sering muncul pada proses wawancara terkait penegakkan hukum yaitu kata sanksi. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa dimensi Penegakan Hukum sangat erat kaitannya dengan ada dan tidaknya sanksi yang diberikan, baik kepada kelompok pemerintah maupun kelompok masyarakat. Berkaitan dengan sanksi tentunya sanksi bagi pemerintah dan masyarakat berbeda, sanksi bagi pemerintah berkaitan dengan sesuai tidaknya realisasi penggunaan anggaran dengan yang direncanakan. Sedangkan, sanksi bagi masyarakat ini berkaitan dengan sesuai tidaknya pemanfaatan fasilitas atau bantuan yang diterima.

Gambar 6. *Word Cloud* Kontinuitas Usaha



Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi NVivo 12, 2025

Word cloud pada **Gambar 6** menunjukkan bahwa kata yang paling sering muncul pada proses wawancara terkait kontinuitas usaha adalah kata berkomitmen. Hal ini berarti berdasarkan hasil wawancara, kunci dari kontinuitas usaha adalah komitmen. Dalam hal ini, komitmen yang dimaksud adalah komitmen dalam menjalankan program ketahanan pangan di Kota Ternate.

Gambar 7. *Word Cloud* Adaptasi dan Belajar



Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi NVivo 12, 2025

Kata yang paling sering muncul dalam proses wawancara terkait dimensi adaptasi dan belajar adalah kata evaluasi sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 7**. Setiap program yang telah dilaksanakan kemudian perlu dievaluasi untuk diketahui bagaimana progress dari pelaksanaan program, hal apa yang perlu diperbaiki dan inovasi apa yang dapat dilakukan.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Ternate

Berdasarkan hasil analisis data terkait faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan, menggunakan aplikasi NVivo 12, maka berikut ini adalah hasil dan pembahasan terkait faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate.

Gambar 8. *Word Cloud* Faktor Pendukung



Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi NVivo 12, 2025

Menurut **Gambar 8**, faktor pendukung dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate adalah anggaran, SDM dan Komunikasi. Yang dimaksud dari hasil tersebut, yaitu faktor pendukung dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate adalah (1) adanya anggaran yang cukup, (2) sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan (3) komunikasi dan sinergitas yang baik antar pihak terkait.

Gambar 9. *Word Cloud* Faktor Penghambat



Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi NVivo 12, 2025

Sedangkan, untuk faktor penghambat dapat dilihat pada **Gambar 9**, yang menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate adalah anggaran, SDM dan cuaca. Hasil ini dimaksud bahwa faktor penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate adalah (1) kurangnya anggaran, (2) kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan (3) kondisi cuaca buruk.

Anggaran dan SDM dapat menjadi faktor pendukung sekaligus faktor penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate. Anggaran sangat mendukung jalannya berbagai program dan kegiatan, namun jika anggaran yang ada kurang, maka dapat mempengaruhi bahkan menghambat jalannya program dan kegiatan tersebut. Selain anggaran, SDM yang berkualitas sangat

mendukung dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate, namun jumlah SDM berkualitas yang telah ada di Kota Ternate masih kurang sehingga masih menjadi salah satu faktor penghambat.

Faktor pendukung lain yaitu adanya komunikasi dan sinergitas yang baik antar pihak terkait. Hal ini menjadi faktor pendukung karena dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate, pemerintah daerah berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga komunikasi dan sinergitas ini dapat memberikan dampak yang sangat positif. Sedangkan, kondisi cuaca buruk menjadi salah satu faktor penghambat karena di Kota Ternate merupakan daerah kepulauan, sehingga terdapat 3 kecamatan yang terletak di 3 pulau terluar, yang hanya dapat diakses melalui transportasi laut, sehingga apabila kondisi cuaca buruk maka pemerintah daerah akan sulit menjangkau ketiga kecamatan tersebut.

3.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Ternate

Terdapat faktor penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Ternate perlu melakukan beberapa upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Ternate, yaitu (1) memaksimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, dimana upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan (2) mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan khusus bagi PNS dengan latar belakang pendidikan bidang pertanian untuk mengisi jabatan fungsional penyuluh pertanian dan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi penyuluh pertanian yang telah ada.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Adanya *political will* (kemauan politik) pemerintah daerah tentunya memberikan dorongan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate. *Political will* merupakan dorongan awal sehingga lahir berbagai tindakan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Brinkerhoff, 2007) bahwa transisi berkelanjutan dimulai sebagai proses yang diprakarsai oleh aktor domestik yang memiliki *political will* untuk melakukan perubahan atas inisiatif mereka sendiri. Salah satunya, inisiatif pemerintah dalam *political will*, yaitu dorongan untuk menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan, dari inisiatif pemerintah ini kemudian lahirlah peran pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh (Rumawas et al., 2021).

Selain itu, prioritas dalam *political will*, yaitu bagaimana pemerintah daerah melakukan pengaturan anggaran dan program yang disesuaikan dengan anggaran, hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan & Sadad, 2022) terkait implementasi strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya, mobilisasi dukungan politik dalam *political will* juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra et al., 2024), yaitu perlu ada kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam *political will* juga mengkaji terkait komitmen, evaluasi dan inovasi hingga penegakkan hukum, sehingga penelitian terkait *Political Will* Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ini memperoleh hasil yang lebih menyeluruh dan jelas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa *political will* pemerintah daerah telah baik dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate. Pemerintah daerah Kota Ternate telah menunjukkan Inisiatif Pemerintah melalui program ketahanan pangan dalam RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026, menentukan Prioritas melalui pemilihan kegiatan dan perencanaan

anggaran, sudah terdapat Mobilisasi Dukungan Politik yaitu kolaborasi antar pemerintah daerah Kota Ternate maupun dengan berbagai pihak, adanya Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya melalui tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya pengalokasian sumber daya berupa pemberian fasilitas bantuan, adanya penegakan hukum melalui pemberian sanksi, jika terjadi penyelewengan, adanya Kontinuitas Usaha dengan berkomitmen dalam menjalankan setiap program dan kegiatan, serta adanya adaptasi dan belajar melalui proses evaluasi dan inovasi yang dihasilkan. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Anggaran dan SDM merupakan faktor pendukung sekaligus faktor penghambat. Anggaran yang cukup dan SDM berkualitas menjadi faktor pendukung. Sebaliknya, anggaran yang tidak mencukupi dan kurangnya SDM berkualitas dapat menjadi faktor penghambat. Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu komunikasi dan sinergitas yang baik antar pihak terkait. Sedangkan, yang dapat menjadi faktor penghambat lain adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, yaitu kondisi cuaca buruk karena dapat menghambat distribusi pangan khususnya ke daerah tiga pulau terluar. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi faktor penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate, yaitu pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan anggaran sehingga bisa lebih efektif dan efisien melalui perencanaan anggaran yang baik. Selanjutnya, pemerintah daerah Kota Ternate mengembangkan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon penyuluh pertanian dan meningkatkan kualitas penyuluh pertanian yang telah ada melalui kegiatan bimtek.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya terbatas dilaksanakan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dimana Kota Ternate merupakan daerah yang paling tahan pangan di Provinsi Maluku Utara, sehingga untuk kedepannya sebaiknya penelitian terkait political will pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan di daerah tahan pangan lainnya maupun di daerah yang masih rawan pangan agar dapat diperoleh hasil penelitian yang berbeda dari hasil penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Dengan adanya penelitian ini sebaiknya dapat mendukung pengembangan penelitian di masa mendatang khususnya terkait *political will* pemerintah daerah lain dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang utama ditujukan kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate dan Dinas Pertanian Kota Ternate serta masyarakat petani selaku informan yang telah mendukung jalannya penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu jalannya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Brinkerhoff, D. (2010). Unpacking the concept of political will to confront corruption. *U4 Brief, 1*, 1–4. <https://www.cmi.no/publications/file/3699-unpacking-the-concept-of-political-will-to.pdf>
- Brinkerhoff, D. W. (2007). Where There's a Will, There's a Way-Untangling Ownership and Political Will in Post-Conflict Stability and Reconstruction Operations. *Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel.*, 8(August), 111.
- Bungin, B. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods*. Kencana.
- FAO. (2024). *Building resilience in food systems*. Food and Agriculture Organization.

- <https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/building-resilience-in-food-systems/en>
- Harris, R. F., Wahyuni, I., & Prihatiningtyas, W. (2023). Advocacy on Combating Hunger: Political Will of the Kedunggebang Village Government to Implement Banyuwangi Response to Stunting Programs in 2022. *Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services*, 5(1), 1–34.
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunan*. Rajawali Pers.
- Mahendra, D. G., Fauzi, L. M., & Sukmapriyandhika, D. (2024). Collaborative Governance Pemerintah Daerah dan Satkorwil dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Mimika. *Jurnal Prinsip*, 1(1), 1–16.
- Muhyie, J. H., Yayeh, D., Kidanie, S. A., Metekia, W. A., & Tilahun, T. (2025). Synthesizing the impact of armed conflicts on food security, livelihoods and social dynamics in Amhara region, Ethiopia. *BMC Nutrition*, 11(29), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s40795-025-01013-5>
- Nor, B. A., & Yusof, Y. (2025). Environmental degradation and food security in Nigeria. *Discover Sustainability*, 6(75), 1–17. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.8083>
- Purnamawati, A. (2020). Penerapan Metode Penelitian Kualitatif Untuk Manajemen. *Repository Institut Manajemen Koperasi Indonesia*, 18, 9.
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1), 1–12.
- Siahaan, N. D. N., & Sadad, A. (2022). Implementasi Strategi Dinas Ketahanan Pangan Di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 5(2), 1262–1270.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sirait, D. E. S. (2023). *Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Menjaga Ketersediaan Kebutuhan Pangan di Kota Batam*. Universitas Putera Batam.
- Suhaedah, D. Y., Syamsudin, U., & Moralitha Mazya, T. (2023). Strategi Dan Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 1412–1482.
- Sutrisno, A. D., Cahyadi, W., Taufik, Y., & Sumartini. (2022). *Ketahanan Pangan*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://fisip.untirta.ac.id>
- Thuynsma, H. A. (2025). Willing to be transparent? Assessing political parties' commitment towards regulating party aid in South Africa. *Policy Studies*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/01442872.2025.2464659>